

**OPTIMALISASI PEMBINAAN TERITORIAL GUNA MEWUJUDKAN  
KETAHANAN WILAYAH YANG TANGGUH DALAM RANGKA  
PERTAHANAN NEGARA**

**BAB - I  
PENDAHULUAN**

**1. Umum.**

a. Pada era globalisasi saat ini, Bangsa Indonesia di hadapkan pada satu dilema dibidang keamanan nasional dengan mengemukanya isu Demokratisasi, masalah Hak Asasi Manusia, degradasi Lingkungan Hidup dan isu keamanan seperti aksi Terorisme Internasional dan kejahatan Trans Nasional. Isu-isu ini menunjukkan peningkatan cukup tajam dan berkembang menjadi isu keamanan dunia. Disamping itu, isu-isu keamanan nasional seperti separatisme bersenjata, radikalisme dan konflik komunal masih melanda sejumlah negara terutama negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Hal tersebut diidentifikasi sebagai bagian strategi politik negara adi kuasa agar memiliki celah untuk dapat melakukan intervensi politik terhadap negara-negara di dunia dalam upaya memelihara dominasinya terhadap dunia Internasional. Guna mewujudkan ambisi politiknya, maka strategi yang di gunakan adalah melakukan intervensi dan infiltrasi kedalam tubuh organisasi kemanusiaan yang ada di negara tersebut dengan dalih bantuan kemanusiaan. Dengan mencermati perkembangan situasi nasional pada periode akhir-akhir ini khususnya sejak bergulirnya gerakan reformasi tahun 1998 hingga saat ini, maka dapat diyakini bahwa bangsa Indonesia telah terjebak dalam strategi politik negara adi kuasa, kondisi ini dapat ditunjukkan oleh masih terjadinya euforia reformasi yang menjurus kearah rusaknya sistem dan tatanan sosial dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, mengemukanya serangkaian konflik komunal dan konflik sosial di tengah kehidupan masyarakat yang banyak diawali oleh isu agama, etnisitas, masalah kesenjangan sosial dan pertikaian antara partisan partai politik serta meningkatnya gerakan separatisme di Aceh, Papua dan Maluku sehingga menjadi cikal bakal pemicu perpecahan (fragmentasi) yang mengarah ke disintegrasi bangsa. Dan disisi lain munculnya aksi terorisme di Indonesia yang banyak menelan korban jiwa telah pula menambah beban pemerintah dalam upaya memelihara stabilitas keamanan nasional, hal tersebut

diperburuk dengan rapuhnya ketahanan wilayah yang belum mampu menangkal setiap bentuk ancaman yang mungkin timbul.

b. Menyikapi fenomena terhadap ancaman disintegrasi bangsa yang bersumber dari terjadinya serangkaian konflik dalam kehidupan masyarakat dan goyahnya sendi-sendi kondisi sosial masyarakat, bila tidak dapat segera teratasi dan tertangani secara tuntas diprediksikan akan dapat merusak sistem pertahanan negara yang pada gilirannya akan mengakibatkan terjadinya instabilitas keamanan nasional. Menghadapi situasi tersebut maka tuntutan mendesak yang perlu segera dilakukan adalah penanganan dan penyelesaian konflik, meniadakan serta meredam aksi separatisme dan mewujudkan ketahanan wilayah, tugas tersebut tidak mampu bila hanya dilakukan oleh salah satu komponen bangsa, tetapi lebih pada penanganan secara komprehensif dan terpadu yang melibatkan seluruh aparatur pemerintah termasuk TNI bersama dengan komponen bangsa lainnya. TNI AD sebagai salah satu komponen TNI yang memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pertahanan negara didarat dituntut untuk mampu mengatasi ancaman tersebut dengan mengoptimalkan fungsi pembinaan teritorial di tiap-tiap Komando Kewilayahan.

c. Agar arah optimalisasi Pembinaan Teritorial mencapai kondisi yang diharapkan, maka konsekuensi yang perlu ditempuh adalah melakukan pembinaan kedalam organisasi dan pembinaan terhadap masyarakat, ditempuh melalui upaya peningkatan profesionalisme aparat teritorial yang meliputi peningkatan kemampuan teritorial dan pemahaman terhadap hakekat ancaman, sedang pembinaan terhadap masyarakat ditempuh melalui penerapan metoda pembinaan teritorial yang tepat dan terarah yang mengacu kepada trend perkembangan ancaman.

## 2. **Maksud dan Tujuan.**

a. **Maksud.** Penulisan naskah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang optimalisasi pembinaan teritorial guna mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh dalam rangka Pertahanan Negara.

b. **Tujuan.** Menyampaikan alternatif sumbangan pemikiran kepada pimpinan dalam menyikapi permasalahan yang terjadi saat ini guna mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh dalam rangka pertahanan negara aspek darat.

3. **Ruang lingkup dan Tata urutan.**

a. **Ruang lingkup.** Ruang lingkup bahasan meliputi optimalisasi pembinaan teritorial yang dibatasi pada peningkatan profesionalitas aparat teritorial Kodim dan penerapan manajemen teritorial yang tepat serta terarah dan mengacu kepada tren perkembangan ancaman.

b. **Tata urutan.** Dalam penulisan ini disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan.
- 2) Latar belakang pemikiran.
- 3) Kondisi Pembinaan Teritorial saat ini.
- 4) Faktor-faktor yang mempengaruhi.
- 5) Kondisi Pembinaan Teritorial yang diharapkan.
- 6) Optimalisasi Pembinaan Teritorial.
- 7) Penutup.

4. **Metoda dan Pendekatan.**

a. **Metoda.** Metoda yang digunakan penulisan naskah ini adalah diskriptif analisis yaitu mendiskripsikan masalah sesuai fakta melalui proses analisa.

b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan dalam penulisan naskah ini adalah pendekatan teori dan empiris yaitu melalui study kepustakaan serta pengamatan dilapangan.

5. **Pengertian.** (Lampiran "B")

## **BAB- II**

### **LANDASAN PEMIKIRAN**

6. **Umum.** Komando Kewilayahan yang merupakan gelar kekuatan TNI AD, memiliki tugas dan tanggung jawab melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah tanggung jawabnya, tujuannya adalah untuk mewujudkan daya tangkal dan ketangguhan suatu wilayah terhadap berbagai bentuk ancaman, baik yang bersumber dari luar maupun dari dalam negeri yang akan mengancam keselamatan bangsa, kedaulatan negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan mencermati perkembangan situasi nasional saat ini yang diwarnai oleh berbagai konflik serta ancaman disintegrasi bangsa, maka aparat teritorial dituntut harus mampu memainkan peran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan senantiasa tetap berlandaskan pada koridor dan rambu hukum yang berlaku.

7. **Landasan Historis.**

a. Berdasarkan sejarah kelahirannya TNI yang berasal dari rakyat, senantiasa konsisten dan konsekuen terhadap komitmennya menjaga keselamatan bangsa, menegakkan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari setiap hakekat ancaman yang timbul, hal ini dapat dilihat dari masa perjuangan TNI dalam setiap periode sejarah perjuangan bangsa Indonesia mulai dari masa perjuangan fisik merebut kemerdekaan hingga masa perjuangan dalam mengisi kemerdekaan Indonesia.

b. Mencermati pasang surutnya dinamika perjalanan demokrasi di Indonesia, disadari atau tidak pada masa Orde Baru ABRI telah secara langsung terlibat dalam kehidupan politik praktis, hal ini disebabkan oleh kesalahan dalam menjalankan konsep Dwi Fungsi ABRI, dimana ABRI telah berperan ganda, disatu sisi ABRI melaksanakan peran dan fungsinya sebagai alat negara dibidang Hankam dan disisi lain ABRI menjalankan peran dalam kehidupan Sosial Politik, seiring dengan pengaruh globalisasi dunia yang mengangkat isu demokratisasi telah membangkitkan kesadaran politik masyarakat untuk menuju kehidupan politik yang demokratis yang diwujudkan melalui gerakan reformasi, mengakibatkan TNI menjadi sasaran kesalahan dan pada akhirnya eksistensi TNI menjadi terpuruk.

c. Belajar dari pengalaman tersebut, maka saat ini dan kedepan TNI harus mampu tampil secara profesional dan proporsional sesuai fungsi dan perannya sebagai alat negara dibidang pertahanan, oleh karenanya TNI harus kembali kepada jati dirinya sebagaimana yang telah di gariskan dalam UU No. 34 Th. 2004 tentang Peran TNI.

## 8. Landasan Filosofis.

### a. Landasan Idiil.<sup>5)</sup>

1) Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pada hakekatnya merupakan sumber dari segala sumber hukum dan cerminan nilai-nilai dasar kehidupan nasional yang mengajarkan keselarasan, keseimbangan baik dalam hidup sebagai pribadi maupun dalam hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan manusia dengan alam serta hubungan manusia dengan Tuhannya, oleh karena itu falsafah Pancasila sangat relevan sebagai landasan ideologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2) Pancasila sebagai ideologi negara telah mengalami berbagai ujian dan cobaan dalam sejarah perjalanan politik bangsa Indonesia, namun pada akhirnya Pancasila tetap mampu berdiri kokoh sebagai alat pemersatu bangsa, hal ini tidak terlepas dari peran TNI bersama rakyat yang selalu konsisten dan konsekuen dalam mengawal dan menegakkan Pancasila.

### b. Landasan Konstitusional.<sup>6)</sup>

1) UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional negara, menentukan sistem dan bentuk negara serta pemerintahan yang bersifat demokratis, pada Pembukaan UUD 1945 memuat maksud didirikan NKRI, cita-cita, tujuan dan dasar negara harus dipatuhi dan dilaksanakan secara konsisten oleh TNI.

2) Pembukaan dan batang tubuh UUD 1945 sebagai bagian yang tidak terpisahkan, telah memuat pokok-pokok pikiran tentang penyelenggaraan pertahanan Negara, antara lain :

a) Kemerdekaan adalah hak segala bangsa, oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

b) Pemerintah Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

---

<sup>5)</sup> Pancasila, Skep Danseskoad No. 52-07-B1-A0101 a, hal. 3-13.

<sup>6)</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Skep Danseskoad No. 52-07-B1-0101b, hal. 9-25

sosial.

- c) Kemerdekaan Indonesia disusun dalam suatu susunan NKRI yang berkedaulatan rakyat.
- d) Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
- e) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Berdasarkan kepada pokok-pokok pikiran tersebut, maka TNI sebagai alat negara dibidang pertahanan harus senantiasa berpegang teguh untuk mengamankan amanat UUD 1945.

## 9. Landasan Konseptual.

- a. **Landasan Visional (wawasan Nusantara).<sup>7)</sup>** Wawasan Nusantara pada hakekatnya adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang mencakup persatuan kepulauan Nusantara, sebagai kesatuan ekonomi, sosial budaya maupun pertahanan keamanan dalam perwujudannya sebagai kesatuan geopolitik dan geostrategi. Bangsa Indonesia memandang bahwa keutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan makna seluruh bangsa, serta menjadi modal milik bersama bangsa, sementara dalam perwujudan sebagai kesatuan pertahanan keamanan, bangsa Indonesia memandang dan bersikap bahwa ancaman terhadap suatu pulau atau wilayah pada hakekatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara, oleh karena itu ancaman terhadap sebagian wilayah negara berarti ancaman terhadap keutuhan wilayah NKRI.
- b. **Landasan Konsepsional (Tannas).<sup>8)</sup>** Ketahanan Nasional bagi bangsa Indonesia merupakan pedoman bagi upaya bangsa untuk mewujudkan suatu kondisi dinamis dari segenap aspek kehidupannya. Sebagai suatu kondisi Ketahanan Nasional tencermin pada kemampuan dan ketangguhan bangsa, sedang dilihat dari sifat Ketahanan Nasional merupakan gabungan keseluruhan dari ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya dan ketahanan

---

<sup>7)</sup> Wawasan Nusantara, Skep Danseskoad No. 52-07-B1-0106a, hal. 3-8.

<sup>8)</sup> Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, hal 10.

Pertahanan Keamanan. Ketahanan Nasional merupakan suatu doktrin yang berorientasi pada kebangsaan, yaitu sebuah ketahanan yang mengarah kepada tumbuh dan menguatnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Menyikapi eksese negatif demokratisasi bangsa Indonesia pada saat ini yaitu terjadinya embrio disintegrasi bangsa, maka Ketahanan Nasional perlu ditumbuhkembangkan, keuletan dan ketangguhan dalam bidang pertahanan perlu diwujudkan dengan suatu tekad kebersamaan serta semangat yang tinggi, dengan demikian diharapkan Indonesia yang demokratis dapat terwujud melalui Doktrin Ketahanan Nasional.

10. **Landasan Operasional.**

a. **UU RI NO. 3 / 2002.** Pada pasal 10 ayat (3) UU RI NO. 3/2002, menjelaskan bahwa, tugas TNI adalah melaksanakan kebijakan pertahanan negara, untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan Operasi Militer selain Perang dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan pendamaian regional dan internasional.

b. **UU RI NO. 34 / 2004.** Pada Pasal 7 ayat (1) UU RI NO 34/2004, menjelaskan bahwa, tugas menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia serta mengatasi ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara senantiasa dilaksanakan oleh TNI secara konsisten dan konsekuen.

c. **UU RI NO. 22 / 1999.** Dengan diberlakukannya Undang-Undang RI No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, maka terdapat indikator bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Departemen Pertahanan didaerah tidak berjalan dengan maksimal. Hal tersebut dikarenakan menguatnya semangat kedaerahan dan pemahaman tentang otonomi daerah yang belum dapat menjangkau semua lapisan masyarakat secara maksimal serta lemahnya pemahaman pejabat Pemda tentang PTF Dephan didaerah.

11. **Landasan Teori.**

a. **Teori Perang menurut Sun Tzu.** Dalam teori perang Sun Tzu, ia meletakkan dasar yang penting dalam profesionalisme berperang antara lain : kenali musuh dan kenali diri sendiri, maka anda bisa bertempur ribuan kali tanpa terancam kalah. Mengandung pengertian bahwa dalam menghadapi suatu pertempuran perlu diketahui secara pasti hakekat ancaman dan musuh yang akan dihadapi serta memahami kemampuan dan kekuatan pasukan sendiri untuk menghadapi perang. Sukses bukanlah melakukan apa yang perlu dilakukan. Sukses adalah "melampaui"

apa yang perlu dilakukan. Agar sukses anda harus melampaui “aturan-aturan biasa” dan menetapkan standar-standar prestasi baru. Lalu anda harus memecahkan rekor anda sendiri. Apa yang sukses di masa lalu, mungkin tetap efektif di masa depan. Tetapi entah dimana, entah kapan, seseorang akan menetapkan standar prestasi baru. Standar-standar baru dihasilkan dari perubahan-perubahan dalam proses.<sup>9)</sup>

b. **Reformasi Internal TNI.**<sup>10)</sup> Komitmen TNI untuk melaksanakan reformasi adalah tekad dan kemauan politik TNI yang ditunjukkan untuk mewujudkan tentara yang profesional dalam memerankan diri sebagai alat negara dibidang pertahanan negara. Sebagai tentara profesional, TNI telah memiliki komitmen untuk menjauhkan diri dari keterlibatannya dalam politik praktis serta berada dibawah kekuasaan pemerintah yang dipilih rakyat secara kontitusional dan demokratis yang diimplementasikan sebagai berikut :

- 1) TNI tunduk pada otoritas politik pemerintah yang dipilih oleh rakyat sesuai dengan nilai-nilai demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dalam pelaksanaan tugasnya TNI senantiasa melaksanakan tugas negara untuk kepentingan nasional.
- 2) Tugas Pokok TNI sebagaimana dimaksud pada UU No. 34 tahun 2004 pasal 7 ayat (1) dilakukan dengan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.
- 3) TNI sebagai bagian dari sistem nasional, tidak mengambil posisi eksklusif tetapi senantiasa memelihara keterkaitan dengan berbagai komponen bangsa yang lain.
- 4) TNI dalam menjalankan tugasnya sesuai aturan pelibatan yang ditetapkan pemerintah.
- 5) Beberapa perubahan struktural antara lain : Pemisahan Polri dan TNI, Penghapusan jabatan Kasospol TNI dan Kaster TNI dalam organisasi TNI, Penghapusan Dwi Fungsi ABRI, Likuidasi fungsi kekaryaan serta sospol TNI, Penghapusan keberadaan Fraksi TNI-Polri di lembaga Legislatif paling lambat tahun 2009, namun terlaksananya lebih cepat yaitu tahun 2004 dan Perubahan Doktrin dan Organisasi TNI serta Perubahan Dephankam menjadi Dephan.

---

<sup>9)</sup> Sun Tzu For Succes, Steven Michaelson, hal 114.

<sup>10)</sup> REFORMASI INTERNAL TNI DAN PARADIGMA BARU TNI Hal 13 - 14.

**BAB - III****KONDISI PEMBINAAN TERITORIAL SAAT INI**

12. **Umum.** Pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh aparat teritorial disetiap Komando Kewilayahan ditingkat Kodim secara umum telah berjalan sesuai dengan yang diprogramkan, namun dihadapkan kepada tuntutan untuk mampu mewujudkan stabilitas keamanan wilayah seiring dengan perkembangan situasi pada lingkungan strategis saat ini dan mengemukanya berbagai permasalahan konflik diberbagai wilayah nasional yang telah menjurus kepada disintegrasi bangsa, maka hasil pembinaan yang telah dilaksanakan belum mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan, indikasi yang terlihat adalah masih terjadinya beberapa konflik dalam masyarakat yang belum mampu diatasi secara tuntas oleh keberadaan aparat teritorial, hal ini merupakan salah satu indikator bahwa kurang profesionalnya aparat teritorial dan kurang tepatnya penerapan manajemen teritorial dihadapkan dengan sasaran pembinaan.

13. **Tinjauan Profesionalitas Aparat Teritorial.**

a. **Sikap dan Perilaku Aparat Teritorial.** Pembinaan teritorial yang lahir ditengah-tengah perjuangan bangsa bertujuan menciptakan semangat persatuan dan kesatuan khususnya antara TNI dengan Rakyat. Semangat inilah yang merupakan tuntutan terhadap aparat teritorial Kodim agar senantiasa memiliki sikap dan perilaku prajurit yang berdasarkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Sikap dan perilaku yang tercermin dari para aparat teritorial saat ini pada umumnya sudah baik, namun demikian masih terdapat sikap dan perilaku aparat teritorial dilapangan yang tidak menunjukkan identitasnya sebagai prajurit rakyat, sehingga menimbulkan image negatif oleh masyarakat terhadap keberadaan TNI ditengah masyarakat.

b. **Kemampuan Aparat Teritorial.**

1) Kemampuan Deteksi dini, Lapor cepat dan Cegah dini. Kemampuan deteksi dini, lapor cepat dan cegah dini yang seharusnya mutlak dimiliki secara optimal oleh setiap aparat teritorial yang berada diwilayah, dinilai masih jauh dari yang diharapkan, hal ini terlihat dari sering terdadaknya aparat teritorial dengan munculnya beberapa konflik yang terjadi tanpa mampu diantisipasi jauh sebelum terjadinya konflik, kondisi ini mengindikasikan bahwa para aparat teritorial belum memiliki kemampuan dalam mempelajari sumber dan anatomi konflik yang mungkin timbul diwilayah tanggung

jawabnya.

2) Kemampuan penerapan Manajemen Teritorial. Kemampuan penerapan manajemen teritorial oleh Kowil khususnya di tingkat Kodim dirasakan kurang berorientasi kepada tren perkembangan situasi yang terjadi, manajemen yang dilakukan oleh aparat teritorial saat ini masih berorientasi pada pembinaan rutin sesuai program, hal ini masih minimnya pemahaman unsur pimpinan terhadap manajemen konflik dan manajemen modern, akibatnya pembinaan teritorial yang dilakukan masih kurang mampu menjawab prioritas tantangan tugas yang harus di selesaikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

3) Kemampuan Penguasaan Wilayah. Kemampuan penguasaan wilayah sesuai dengan tanggung jawabnya mutlak bagi setiap aparat teritorial agar mampu mengklasifikasikan wilayah tanggung jawabnya tersebut sesuai dengan hakekat ancaman yang akan dan mungkin timbul, serta mampu mengidentifikasi penduduk diwilayahnya yang mungkin dicurigai dapat menjadi provokator dan belum mampu menguasai wilayah tanggung jawabnya secara utuh dan prospektif.

4) Kemampuan Pembinaan Perlawanan Rakyat. Kemampuan penyiapan tenaga perlawanan rakyat untuk membantu TNI dalam meredam konflik yang terjadi di daerah, hingga saat ini belum terwujud secara optimal oleh para aparat teritorial yang berada diwilayah, kekuatan minimal tenaga rakyat terlatih yang harus disiapkan oleh Komando Kewilayahan hampir tidak dapat terpenuhi, kondisi yang demikian mengindikasikan bahwa aparat teritorial belum mampu menguasai wilayah tanggung jawabnya secara utuh untuk melaksanakan pembinaan perlawanan rakyat.

5) Kemampuan Komunikasi Sosial. Unsur pokok dalam komunikasi sosial yang terjadi saat ini adalah aparat teritorial diwilayah khususnya Kodim, belum mampu menterjemahkan dan melakukan interaksi dalam berkomunikasi dengan masyarakat, yang berakibat banyaknya kebijakan-kebijakan yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pertahanan negara, sehingga berakibat kepada langkah dan tindakan TNI tidak direspon positif oleh masyarakat.

c. **Sarana dan prasarana.** Dalam mendukung pelaksanaan tugas dilapangan, kesiapan sarana dan parasarana memegang peranan penting dalam mewujudkan

keberhasilan pelaksanaan tugas para aparat teritorial di lapangan. Kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satuan Komando Kewilayahan di tingkat Kodim khususnya piranti lunak, sarana transportasi dan sarana komunikasi belum dapat memenuhi tuntutan tugas dilapangan, sehingga kecepatan dan ketepatan dalam menangani setiap permasalahan yang timbul tidak dapat diatasi dengan cepat dan tepat sasaran.

14. **Penerapan metoda pembinaan teritorial.** Penerapan metoda pembinaan teritorial yang di lakukan oleh para aparat teritorial diwilayah saat ini dinilai belum tepat dan terarah kepada tujuan dan sasaran yang di inginkan, hal ini diakibatkan oleh masih kurang optimalnya tingkat kemampuan aparat teritorial dalam menyikapi berbagai permasalahan yang timbul sebagai akibat dari perkembangan situasi serta perubahan hakekat ancaman yang dinamis, sehingga penerapan metoda yang dilakukan oleh aparat teritorial kurang berorientasi kepada kemungkinan prioritas sasaran pembinaan. Akibat dari pembinaan yang dilakukan kurang terarah pada sasaran yang diharapkan, maka upaya menciptakan stabilitas keamanan diwilayah tanggung jawabnya tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan tidak berorientasi kepada kemungkinan hakekat ancaman.

**BAB - IV****FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI**

15. **Umum.** Sebagian besar konflik yang terjadi di hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat saat ini telah menjurus kepada fragmentasi dan disintegrasi bangsa serta terjadinya perubahan sifat destruktif masyarakat yang secara nyata tidak mencerminkan budaya dan karakter bangsa Indonesia, hal ini disebabkan oleh dampak negatif dari perkembangan lingkungan strategis yang berlatar belakang isu global yaitu Isu Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Degradasi lingkungan Hidup yang sengaja dihembuskan oleh negara tertentu untuk menghancurkan kekuatan fundamental Bangsa Indonesia.

16. **Faktor Eksternal.** Faktor-faktor eksternal yang dinilai dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia yang cenderung kearah terjadinya konflik saat ini adalah sebagai berikut :

a. **Perkembangan Tehnologi Informasi.** Pesatnya laju perkembangan teknologi informasi, media elektronika dan transportasi telah mengakibatkan dunia semakin transparan seakan tanpa ada batas yang memisahkan antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya, interaksi pergaulan antar bangsa semakin mudah menembus semua lapisan kehidupan bangsa sampai ke semua pelosok wilayah, akibatnya nilai-nilai asing yang terkadang tidak sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia mengalir secara deras dan tidak mungkin terbandung, sehingga mampu mengubah sikap dan perilaku masyarakat secara tidak terkontrol.

b. **Isu Global.** Kondisi Negara Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, menjadikan Negara Indonesia tidak memiliki posisi tawar yang tinggi baik dalam kawasan Regional maupun Internasioanl, akibatnya setiap masalah yang terjadi dalam negeri yang berkaitan dengan isu global, Indonesia harus mau menerima dan menghadapi Intervensi negara lain yang kadang sangat tidak menguntungkan bagi pemerintah Indonesia, kondisi yang demikian senantiasa menimbulkan gelombang ketidakpuasan rakyat Indonesia dan pada akhirnya upaya perwujudan stabilitas keamanan nasional menjadi semakin sulit dan berpotensi terjadinya konflik.

c. **Ketergantungan dengan negara lain.** Negara Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia, masih belum mampu hidup secara mandiri ditinjau dari

semua bidang kondisi sosial sehingga masih memerlukan bantuan dari negara-negara kuat, akibatnya Indonesia tidak ada pilihan lain kecuali siap dan harus mau menghadapi konsekuensi sanksi negara lain bila masalah isu global mencuat ke permukaan dan menjadi tren perkembangan yang terjadi.

17. **Faktor Internal.** Faktor Internal yang menjadi belenggu dan mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan kondisi keamanan wilayah yang mantap dan dinamis adalah sebagai berikut :

a. **Kemampuan Perekonomian Negara.** Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 yang hingga saat ini belum mampu diatasi oleh Pemerintah secara tuntas, telah mengakibatkan dampak yang cukup besar terhadap kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab dan sumber konflik yang terjadi di negara Indonesia, disisi lain kondisi perekonomian negara belum mampu mengatasi permasalahan yang terjadi dengan adanya krisis tersebut, sehingga menjadin salah satu tren permasalahan di tanah air saat ini.

b. **Kualitas Sumber Daya Manusia.** Rendahnya kualitas sumber daya manusia masyarakat Indonesia, berimplikasi terhadap rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam menyikapai, menangkal dan memfilter setiap provokasi, agitasi serta pengaruh yang sengaja dihembuskan baik oleh aktor state, aktor non state maupun akton individu yang bertujuan untuk menghancurkan sistem kondisi sosial masyarakat.

c. **Kemampuan TNI.** Kualitas kemampuan TNI di bidang pertahanan Negara saat ini dinilai sangat kurang sebagai akibat dari kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini cukup memprihatinkan serta minimnya anggaran belanja militer yang dialokasikan oleh pemerintah, menyebabkan TNI kurang berdaya untuk mengatasi konflik yang terjadi di berbagai wilayah nasional secara bersamaan. Berpangkal dari kondisi tersebut maka upaya TNI dalam mewujudkan stabilitas keamanan wilayah nasional mengalami hambatan dan kendala dalam pelaksanaanya.

d. **Pemahaman terhadap UU RI NO .3 TH 2002 dan UU RI NO. 34 TH 2004.** Pemahaman masyarakat yang keliru terhadap undang-undang Pertahanan negara dan undang-undang TNI menilai bahwa masalah Kamdagri justru diartikan kearah yang leblh sempit dan hanya berorientasikan pada ancaman keamanan dan ketertiban masyarakat, padahal kenyataannya ancaman keamanan dalam negeri dapat bersumber dari ancaman yang bersifat militer serta bermuara kepada terjadinya konflik yang mengancam Integritas Nasional. Realisasi dari pemahaman yang keliru tersebut berdampak terhadap mekanisme pelaksanaan tugas dilapangan antara TNI dan Polri sehingga penyelesaian permasalahan dilapangan tidak dapat dilaksanakan secara optimal dan bertanggung jawab.

e. **Keberadaan Organisasi Komando Kewilayahan.** Adanya wacana penghapusan organisasi Kowil, merupakan salah satu kerawanan vital terhadap sistem Pertahanan Negara, mengingat inti kekuatan TNI di wilayah terletak pada Komando Kewilayahan yang merupakan gelar kekuatan TNI-AD di wilayah, dan pada sisi lain menimbulkan efek psikologis para aparat teritorial dalam pelaksanaan pembinaan teritorial di wilayah, dan hal ini merupakan kendala yang menghambat proses perwujudan stabilitas keamanan nasional.

f. **Permasalahan HAM.** Pengadilan kasus pelanggaran HAM terhadap prajurit TNI, berdampak terhadap psikologis prajurit TNI dalam pelaksanaan tugas dilapangan yang tidak disertai dengan payung hukum yang kuat sehingga berdampak terhadap keraguan prajurit TNI dalam bertindak dan mengambil keputusan, yang akhirnya berpengaruh terhadap penyelesaian terhadap setiap permasalahan yang terjadi di lapangan.

**BAB - V****KONDISI PEMBINAAN TERITORIAL YANG DIHARAPKAN**

18. **Umum.** Upaya pembinaan teritorial harus lebih terarah pada perwujudan stabilitas kondisi sosial masyarakat dan pembentukan resistensi masyarakat, sehingga masyarakat memiliki daya tangkal terhadap usaha lawan yang akan menghancurkan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara guna menghadapi ancaman terjadinya fragmentasi dan disintegrasi bangsa pada era globalisasi yang terjadi saat ini. Agar upaya tersebut dapat mencapai hasil yang di harapkan, maka konsekuensi yang harus diwujudkan oleh aparat teritorial adalah, memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan sebagai prajurit Sapta Marga, menguasai 5 (lima) kemampuan teritorial sesuai standart yang diharapkan, Penerapan metoda pembinaan teritorial yang dilakukan harus terarah dan tepat sasaran serta didukung oleh sarana serta prasarana yang memadai.

19. **Dibidang Profesionalitas Aparat Teritorial.**

a. **Perwujudan Sikap dan Perilaku Aparat Teritorial.** Sikap dan perilaku aparat teritorial merupakan tuntutan profesionalitas aparat teritorial yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dilapangan, karena cerminan sikap dan tingkah laku yang baik akan sangat mendukung tarcapainya semangat kemanunggalan TNI-Rakyat. Sikap dan perilaku yang diharapkan dari aparat teritorial adalah sikap dan perilaku aparat teritorial yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta mampu menyesuaikan terhadap tren perkembangan situasi yang terjadi di masyarakat, serta tumbuhnya watak dan moral prajurit yang menggambarkan figur seorang aparat kewilayahan yang profesional.

b. **Penguasaan dibidang 5 (lima) Kemampuan Teritorial.** Agar aparat teritorial mampu mewujudkan stabilitas kondisi sosial masyarakat yang kondusif dan membentuk resistensi masyarakat terhadap kemungkinan ancaman yang timbul di wilayahnya, maka kemampuan aparat teritorial yang perlu ditingkatkan sesuai tantangan tugas yang dihadapi saat ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kemampuan Deteksi dini, Lapor cepat dan Cegah dini, seperti :  
*Kemampuan Deteksi dini, bahwa* Aparat teritorial harus memiliki kemampuan dalam mendatangi, mendekati obyek kejadian, mendengarkan suara dan

melihat kejadian yang berada diwilayah tanggung jawabnya guna mendapatkan informasi dari setiap permasalahan yang dihadapi; *Kemampuan Laport cepat, bahwa* Aparat teritorial dalam menyikapi setiap permasalahan yang terjadi harus mampu mengfilter informasi/berita yang diperoleh, selanjutnya mengirim berita tersebut secara cepat dan tepat sasaran dan *Kemampuan Cegah dini, bahwa* Aparat teritorial harus memiliki kemampuan dalam melokalisir setiap kasus yang terjadi agar tidak menyebar dengan cara segera melaporkan ke komando atas.

2) Kemampuan Penerapan Manajemen Teritorial. Kemampuan manajemen teritorial adalah kemampuan dalam menerapkan setiap langkah dan tindakan yang dimulai dari membuat perencanaan kegiatan, pembagian tugas atau pengorganisasian, pengaturan pelaksanaan kegiatan dan pengawasan serta pengendalian guna mendapatkan hasil yang optimal.

3) Kemampuan Penguasaan Wilayah. Kemampuan penguasaan wilayah yang diharapkan adalah kemampuan yang diarahkan untuk menentukan klasifikasi wilayah berdasarkan perkiraan ancaman serta kemampuan menemukan aktor state, aktor non state maupun aktor individu yang dicurigai sebagai pencetus kerusuhan (Provokator).

4) Kemampuan Pembinaan Rakyat Terlatih. Aparat teritorial diharapkan memiliki kemampuan untuk mengorganisir kekuatan rakyat dan melatih rakyat menjadi kekuatan yang memiliki kemampuan dalam mencegah serta menghadapi kemungkinan konflik yang terjadinya ditengah masyarakat, selain itu juga dapat digunakan sebagai tenaga bantuan operasi militer.

5) Kemampuan Komunikasi Sosial. Aparat teritorial harus mampu menterjemahkan program-program pembangunan daerah dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh masyarakat, selain hal tersebut aparat teritorial harus mampu : Membina dan memelihara komunikasi dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh budaya yang ada diwilayah tanggung jawabnya serta dapat memberikan penjelasan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang gelar Komando Kewilayahan dan pembinaan teritorial yang merupakan tugas dan fungsi TNI AD guna mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh dalam rangka Pertahanan Negara.

c. **Dibidang Sarana dan Prasarana.** Komunikasi yang baik antara aparat

teritorial, aparat pemerintah dan masyarakat perlu dipelihara serta dikembangkan, sehingga akan tercapai koordinasi dan kerjasama yang baik. Keberhasilan pelaksanaan tugas akan terwujud apabila aparat teritorial dilengkapi/didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh aparat teritorial guna mendukung pelaksanaan tugas dilapangan. Sarana dan prasarana yang mutlak harus dimiliki oleh satuan Komando kewilayahan setingkat Kodim adalah piranti lunak, sarana transportasi roda empat, roda dua dan sarana komunikasi berupa HT serta sarana prasarana lain yang dapat menunjang pelaksanaan tugas. Kurangnya sarana dan prasarana tersebut berdampak terhadap tidak optimalnya aparat teritorial dalam melaksanakan tugasnya dilapangan.

20. **Dibidang Penerapan metoda Pembinaan Teritorial.** Perkembangan era globalisasi saat ini berdampak terhadap situasi dan kondisi, dimana perilaku masyarakat yang labil akan mudah terpengaruh oleh tren perkembangan yang terjadi, sehingga penerapan metoda pembinaan teritorial yang benar dan tepat sasaran akan sangat menentukan tingkat keberhasilan pembinaan yang dilakukan. Beberapa metoda pembinaan teritorial yang diharapkan dapat diterapkan pada situasi dan kondisi masyarakat saat ini adalah sebagai berikut :

a. **Penerapan metoda Pembinaan Ketahanan Wilayah.** Penerapan metoda ini diharapkan dilakukan pada situasi dimana masyarakat sedang pada kondisi damai/tidak sedang berada pada situasi konflik atau pasca terjadinya konflik agar upaya pembinaan mampu diserap sepenuhnya oleh masyarakat, namun upaya ini harus mampu dilakukan secara berkesinambungan dan dilakukan secara bersama-sama dengan instansi terkait.

b. **Penerapan Metoda Bhakti TNI.** Penerapan metoda Bhakti TNI akan sangat efektif bila dilakukan pada situasi dimana masyarakat sedang menghadapi kesulitan atau tekanan yang membutuhkan bantuan pihak lain, pada situasi demikian aparat teritorial harus mampu tampil memanfaatkan peluang yang ada, bila hal ini dapat dan mampu dieksploitir maka pembinaan yang dilaksanakan akan mencapai hasil yang maksimal dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dengan keberhasilan metoda ini akan berdampak terhadap animo masyarakat terhadap peran dan keberadaan TNI AD yang dibutuhkan oleh masyarakat.

c. **Penerapan metoda Komunikasi Sosial.** Menghadapi fenomena

perkembangan situasi saat ini, dimana peran Media Massa, Tokoh Masyarakat Formal maupun Non Formal dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat mewarnai pembentukan opini masyarakat. Dengan menguasai dan mampu melaksanakan metoda ini, diharapkan aparat teritorial akan dengan mudah di terima keberadaannya di tengah masyarakat sehingga dengan mudah pula melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat.

**BAB - VI****OPTIMALISASI PEMBINAAN TERITORIAL**

21. **Umum.** Rangkaian peristiwa yang terjadi di tanah air dewasa ini, merupakan gambaran terhadap pengaruh era globalisasi yang sarat dengan isu, bila kondisi ini terus berkembang maka fragmentasi antar komponen bangsa menjadi semakin lebar dan pada akhirnya akan terjadi disintegrasi bangsa. Guna mencegah terjadinya dampak tersebut, maka upaya yang perlu ditempuh oleh TNI, khususnya TNI AD yang memikul tugas dan tanggung jawab untuk memelihara stabilitas keamanan nasional di darat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU NO. 3/Th. 2002 dan UU TNI NO. 34 Th. 2004 adalah dengan mengoptimalkan Pembinaan Teritorial. Dalam upaya mengoptimalkan terhadap pelaksanaan Pembinaan Teritorial dapat ditempuh dengan cara meningkatkan kemampuan aparat teritorial di bidang Lima Kemampuan Teritorial, penerapan Metoda Binter secara tepat dan terarah dihadapkan dengan tren perkembangan ancaman.

22. **Tujuan.** Mensinergikan hasil pembinaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga fungsional di bidang Geografi, Demografi dan Kondisi Sosial guna mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh serta mencegah terjadinya disintegrasi bangsa dalam rangka Pertahanan Negara aspek darat.

23. **Sasaran.**

a. **Visi Binter.** Terwujudnya kesamaan pandangan dan tekad oleh seluruh komponen bangsa dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan segenap bangsa, yang didukung oleh TNI AD yang solid, profesional, tangguh, berwawasan kebangsaan dan dicintai rakyat.

b. **Misi Binter.**

1) Mensosialisasikan pemahaman tentang Pembinaan Teritorial TNI AD keseluruhan lapisan masyarakat dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara.

2) Mentransformasikan potensi kewilayahan menjadi kekuatan sebagai komponen cadangan dan pendukung untuk memperkuat TNI AD sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara.

- 3) Mengoptimalkan kegiatan TNI AD yang dapat merebut hati rakyat, mengadakan pembinaan kedalam tubuh TNI AD agar memiliki rasa kebersamaan serta profesional dan disiplin yang tinggi.

24. **Subyek.**

a. **Kasad.** Menjabarkan kebijaksanaan Panglima TNI dan melaksanakan pembinaan personil serta satuan-satuan di jajarannya dalam rangka pembinaan teritorial dan bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada Panglima TNI.

b. **Pangdam.**

- 1) Menetapkan kebijakan teknis operasional, petunjuk dan rencana penyelenggaraan binter di daerah.
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi lain yang terkait tentang rencana pelaksanaan binter.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan binter yang dilakukan oleh institusi TNI AD dibawah Komandonya.
- 4) Bertanggung jawab kepada Kasad atas hasil kegiatan binter yang dilakukan oleh institusi TNI AD di bawah Komandonya.

c. **Danrem.**

- 1) Merencanakan secara teknis operasional pembinaan teritorial di daerah tanggung jawabnya.
- 2) Melaksanakan koordinasi dengan Pemda tentang pelaksanaan binter.
- 3) Melaksanakan pembinaan anggotanya dalam rangka meningkatkan profesionalitas terhadap tugas dan tanggung jawabnya.
- 4) Melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan binter di daerahnya.
- 5) Bertanggung jawab kepada Pangdam atas hasil kegiatan binter yang dilakukan oleh institusi TNI AD di bawah Komandonya.

25. **Obyek.** Obyeknya adalah Kodim, antara lain : Menyelenggarakan kegiatan Binter di daerah tanggung jawabnya serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan misi TNI AD yang dibebankan kepadanya. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan binter dan bertanggung jawab kepada Danrem atas kelancaran kegiatan binter yang dilakukan oleh institusi TNI AD di bawah Komandonya.

26. **Metoda.** Metodenya antara lain : Pendidikan dan Latihan, Penataran, Study Kasus, Penerapan di lapangan dan Komunikasi Massa.

27. **Sarana dan Prasarana.** Untuk mendukung sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan tugas, Kodim perlu melaksanakan koordinasi dengan aparat pemerintah daerah dan instansi terkait guna mencari solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan kebutuhan sarana dan prasarana yang di butuhkan. Adapun sarana dan prasarana tersebut adalah sebagai berikut :

a. **Piranti lunak.** Piranti lunak adalah merupakan sarana yang dapat digunakan sebagai pedoman baik dalam pembekalan kemampuan terhadap aparat teritorial, maupun dalam pelaksanaan tugas dilapangan, sehingga arah pembekalan dan sasaran yang ingin di capai tetap dalam koridor kebijakan komando atas serta dapat di ukur dalam skala pencapaian tujuan.

b. **Sarana Komunikasi.** Untuk mendukung keberhasilan tugas pembinaan teritorial yang meliputi pembinaan potensi geografi, demografi dan kondisi sosial agar menjadi RAK juang yang tangguh dimana membutuhkan kecepatan guna mengimbangi kemajuan era informasi dan transportasi yang begitu pesat. Sarana komunikasi merupakan salah satu sarana vital didalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan dilapangan, khususnya dalam penyampaian setiap berita yang membutuhkan penyelesaian cepat. Dalam mendukung kecepatan dan efektifitas pelaksanaan tugas, maka sarana komunikasi yang dibutuhkan seperti :Alat komunikasi yang modern, seperti HP, HT dll. dan kemampuan intelektual bagi opsional dan pengamanan komunikasi serta piranti lunak alat komunikasi dan personil yang mengoperasikan alat komunikasi tersebut.

c. **Sarana Transportasi.** Upaya dalam pembinaan terhadap potensi geografi, demografi dan kondisi sosial dalam menghadapi ancaman, tantangan dan hambatan serta gangguan, sarana transportasi merupakan sarana vital di dalam menyatukan wilayah yang cukup luas dan rawan dari pengaruh negatif baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sarana transportasi yang di harapkan adalah sarana transportasi yang di sesuaikan dengan kondisi wilayah di Indonesia, baik di gunakan untuk transportasi darat maupun laut.

d. **Anggaran.** Pelaksanaan tugas Komando kewilayahan tidak dapat berjalan dengan lancar sesuai target sasaran yang direncanakan bila tanpa didukung dengan anggaran yang memadai, maka anggaran merupakan salah satu sarana penentu keberhasilan tujuan.

28. **Upaya yang dilaksanakan.** Dalam mewujudkan sasaran pembinaan teritorial yang di harapkan, maka perlu dilaksanakan beberapa upaya sesuai metoda pembinaan teritorial sebagai berikut :

a. **Pendidikan dan latihan.**

1) Metoda Pendidikan dan Latihan digunakan untuk membekali aparat teritorial agar memiliki pengetahuan yang memadai di bidang lima kemampuan teritorial. Metoda ini tidak harus dilakukan di Lembaga Pendidikan tetapi dapat dilakukan dalam satuan sesuai dengan skala waktu yang tersedia.

2) Optimalisasi lima kemampuan teritorial diprioritaskan kepada hal-hal sebagai berikut :

a) *Kemampuan Deteksi dini, Lapor cepat dan cegah dini.*

Pembekalan kemampuan deteksi dini, lapor cepat dan cegah dini terarah pada kemampuan untuk melakukan inventarisasi terhadap setiap kejadian yang timbul di wilayahnya dengan cepat selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pokok masalah yang dihadapi. Dengan tindakan inventarisasi tersebut, diharapkan para aparat teritorial akan mampu memahami secara dini terhadap kemungkinan kecenderungan kasus-kasus yang muncul di wilayahnya berdasarkan frekuensi munculnya permasalahan tersebut. Dengan memahami kecenderungan ancaman yang terjadi maka para aparat teritorial akan mampu mengetahui anatomi dan sumber ancaman yang terjadi di wilayahnya yang sangat diperlukan dalam upaya mengantisipasi dampak lanjutan yang mungkin timbul, sehingga para aparat teritorial akan memiliki naluri kepekaan terhadap kemungkinan yang akan terjadi di wilayahnya.

b) *Kemampuan Manajemen Teritorial.*

Manajemen Teritorial memiliki arti yang sangat penting bagi keberhasilan pembinaan teritorial, mengingat hakekat manajemen teritorial adalah kemampuan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta pengawasan dan pengendalian kegiatan pembinaan. Dihadapkan dengan perkembangan situasi yang terjadi akhir-akhir ini akibat dari perkembangan era globalisasi, maka berpengaruh langsung terhadap kondisi wilayah yang cenderung heterogen. Mencermati hal tersebut, maka upaya pembinaan teritorial yang dilakukan dalam rangka

mengantisipasi dampak yang timbul yaitu melalui pembinaan kemampuan manajemen teritorial bagi aparat teritorial yang berorientasi pada kemungkinan ancaman yang ditimbulkan di wilayah, kemampuan ini mutlak harus dikuasai oleh setiap aparat di lapangan, dengan demikian maka arah optimalisasi pembinaan teritorial harus mencakup kedalam pembekalan kemampuan manajemen teritorial.

c) *Kemampuan Penguasaan Wilayah.* Kemampuan penguasaan wilayah adalah kemampuan memahami terhadap kondisi wilayah beserta komponennya secara nyata. Dengan mengetahui dan memahami kondisi nyata suatu wilayah maka akan dengan mudah untuk mencermati setiap kemungkinan permasalahan yang timbul serta mewujudkan daya tangkal wilayah. Perwujudan daya tangkal wilayah ditandai dengan pelestarian lingkungan aspek geografi, tingkat penyebaran penduduk yang komposit dan harmonisnya dinamika kehidupan sosial masyarakat, oleh karena itu optimalisasi kemampuan aparat teritorial di bidang penguasaan wilayah harus terarah pada kemampuan mewujudkan stabilitas dinamika kehidupan masyarakat yang harmonis, cinta tanah air dan menjunjung tinggi nilai-nilai Demokrasi Pancasila.

d) *Kemampuan Pembinaan Perlawanan Rakyat.* Upaya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan serta menguasai wilayah tidak akan mampu berhasil bila masyarakat memiliki resistensi untuk menghadapi hakekat ancaman yang timbul, resistensi (daya tangkal) tersebut ditunjukkan dengan wujud kesiapan masyarakat secara fisik maupun nonfisik yaitu, secara fisik harus dapat terbentuk kekuatan organisasi perlawanan rakyat, sedang secara non fisik terwujud melalui kesediaan serta kerelaan masyarakat untuk mau secara mandiri mengatasi berbagai ancaman yang timbul di wilayahnya, perwujudan kondisi tersebut harus mampu diciptakan oleh setiap aparat teritorial dalam pelaksanaan pembinaan teritorial. Agar setiap aparat teritorial mampu menciptakan kondisi tersebut maka optimalisasi kemampuan aparat teritorial dibidang pembinaan perlawanan rakyat harus diprioritaskan kepada kemampuan mempengaruhi dan mengajak masyarakat untuk menangkal ancaman yang timbul diwilayahnya serta kemampuan menjadi pelatih perlawanan rakyat.

e) *Kemampuan Komunikasi Sosial.* Kemampuan komunikasi sosial adalah kemampuan dan kepedulian serta kemahiran dalam beradaptasi baik terhadap lingkungan maupun terhadap sesama aparat dan kondisi sosial, dengan memiliki kemampuan maka seorang aparat teritorial akan dengan mudah bergaul dan keberadaannya di terima oleh masyarakat di wilayah tersebut. Kondisi ini merupakan langkah awal keberhasilan dalam mencapai tujuan Binter yang di harapkan, oleh karena itu optimalisasi kemampuan aparat teritorial harus lebih diprioritaskan pada kemampuan seorang aparat teritorial dalam beradaptasi dengan lingkungan dimana ia ditugaskan sehingga langkah dan tindakan pembinaan yang dilakukan dapat diserap dengan mudah oleh masyarakat di wilayahnya.

b. **Penataran.**

- 1) Pelaksanaan penataran dapat dilakukan di lembaga pendidikan maupun dalam satuan didasarkan atas pertimbangan waktu maupun anggaran yang tersedia, titik berat kegiatan penataran ini adalah untuk mengoptimalkan pemahaman aparat teritorial dibidang Manajemen Krisis. Hal ini dipandang penting mengingat krisis yang terjadi diwilayah akhir-akhir ini adalah akibat dari akumulasi konflik yang tidak mampu teratasi secara tuntas sehingga berdampak terhadap instabilitas keamanan wilayah yang lebih luas dan merasuk keseluruhan sendi kehidupan masyarakat.
- 2) Sasaran pembekalan kemampuan yang dilaksanakan meliputi :
  - a) *Kemampuan menganalisa sumber krisis.* Mengingat krisis akan berakibat terhadap instabilitas keamanan dalam skala luas, maka aparat teritorial harus memiliki kemampuan untuk melakukan analisa terhadap permasalahan konflik yang timbul diwilayahnya yang dapat menjadi sumber krisis.
  - b) *Kemampuan memahami anatomi krisis.* Setiap krisis memiliki struktur anatomi yang berbeda tergantung kepada sumber masalah yang timbul, dengan memahami sumber krisis dan konflik yang mengemuka, maka anatomi krisis akan dapat diketahui sedini mungkin sehingga memudahkan dalam penanganan setiap permasalahan yang timbul akibat dari krisis yang terjadi tersebut.

c. **Study Kasus.**

1) Metoda study kasus dalam optimalisasi pembinaan teritorial dilakukan untuk memperkaya pengetahuan dan kemampuan aparat teritorial dalam mengkaji berbagai kasus yang terjadi di wilayah rawan konflik, sehingga para aparat teritorial memiliki kemampuan pemahaman dan langkah tindakan yang di perbuat pada saat mengaplikasikan penerapan metoda pembinaan teritorial di tempat tugasnya. Hal ini sangat penting mengingat tidak semua para aparat teritorial memiliki pengalaman yang cukup dalam penugasan di Komando Kewilayahan, sehingga pembekalan dengan menggunakan metoda aplikasi study kasus sangat membantu para aparat teritorial dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

2) Penerapan metoda Binter. Penerapan metoda pembinaan teritorial adalah merupakan suatu upaya yang dilakukan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembinaan teritorial di lapangan yang disesuaikan dengan kondisi obyek, waktu dan tempat dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

Penerapan metoda yang dilaksanakan dapat berupa :

a) Metoda Bhakti TNI. Metoda bhakti TNI adalah upaya yang di lakukan dengan memberdayakan seluruh kemampuan sebagai kekuatan pertahanan dalam menjalankan fungsi teritorial untuk menunjang pertahanan negara tanpa mengabaikan program pembangunan nasional yang mengutamakan pendekatan kesejahteraan masyarakat dan keamanan, maka penerapan metoda Bhakti TNI akan mencapai hasil yang efektif dan optimal apabila dilakukan pada situasi yang tepat dimana masyarakat sangat memerlukan perhatian dan bantuan, upaya ini harus ditempuh dalam rangka merebut hati dan pikiran rakyat serta memelihara eksistensi TNI khususnya TNI AD ditengah kehidupan sosial masyarakat, oleh karena itu kemampuan metoda bhakti TNI yang dimaksud meliputi : Kemampuan perencanaan, Kemampuan pemilihan obyek sasaran kegiatan, Kemampuan pengendalian kegiatan, Kemampuan mengkoordinasikan dengan instansi terkait dan Kemampuan menentukan tolok ukur keberhasilan.

b) Metoda Bintangwil. Metoda Bintangwil merupakan metoda pembinaan teritorial yang mengutamakan pendekatan keamanan untuk

mewujudkan stabilitas keamanan serta meningkatkan kepekaan dan rasa tanggung jawab masyarakat untuk ikut berperan dalam menanggulangi gangguan keamanan yang mungkin timbul. Penerapan metoda Bintahwil harus dilakukan secara berkesinambungan dan pada situasi yang sangat tepat, metoda ini tidak akan mencapai hasil yang efektif dan optimal bila situasi wilayah dan situasi masyarakat sedang dalam kondisi labil. Sasaran pembinaan terhadap aparat teritorial pada setiap aspek kondisi sosial meliputi beberapa aspek sebagai berikut :

(1) *Aspek Geografi.* Aspek geografi adalah aspek darat yang meliputi komponen 5 aspek medan dan merupakan salah satu aspek pertahanan negara. Prioritas pembinaan yang dilaksanakan pada aspek geografi adalah agar memiliki kemampuan untuk memelihara, memanfaatkan dan mengidentifikasi geografi bagi kepentingan pertahanan darat. Atas dasar tersebut maka upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya geografi baik untuk kepentingan ekonomi maupun untuk kepentingan pertahanan darat sehingga dapat menjadi suatu kekuatan wilayah dalam mendukung pertahanan negara.

(2) *Aspek Demografi.* Aspek Demografi adalah pembinaan terhadap kemampuan memelihara, mendata dan mengembangkan keseimbangan kualitas sumber daya manusia serta penyebaran penduduk sebagai penangkal terhadap segala bentuk ancaman sehingga terpeliharanya potensi masyarakat sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung yang sewaktu-waktu dapat di manfaatkan bagi kepentingan pertahanan darat.

(3) *Aspek Kondisi Sosial.* Tujuan pembinaan penyelenggaraan Kondisi sosial adalah untuk mensosialisasikan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena bela negara merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa dalam mensosialisasikan pentingnya memelihara

stabilitas wilayah yang mantap dan dinamis. Langkah pembinaan yang di tempuh aparat teritorial adalah menimbulkan kesadaran untuk ikut aktif dalam bersosialisasi terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta mampu beradaptasi dengan kondisi sosial kehidupan masyarakat di lingkungannya. Tinjauan pembinaan dilihat dari beberapa bidang antara lain

(a) Bidang Idiologi. Kemampuan untuk memantapkan kondisi mental masyarakat agar mau dengan sadar melaksanakan penghayatan idiologi Pancasila sebagai idiologi negara sesuai dinamika perkembangan situasi tanpa kehilangan nilai dasarnya serta kemampuan mengamankan dan melestarikan idiologi Pancasila di tengah dinamika perubahan corak masyarakat agraris menjadi masyarakat industri serta masyarakat informasi.

(b) Bidang Politik. Kemampuan untuk menumbuhkan kesadaran kehidupan politik masyarakat dalam koridor demokrasi Pancasila pada dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta peningkatan pembangunan politik, pendidikan politik, kaderisasi politik dan memantapkan etika berpolitik pada masyarakat berdasarkan etika dan moral budaya politik Pancasila.

(c) Bidang Ekonomi. Kemampuan untuk mengamankan dinamika kehidupan ekonomi masyarakat dan menyadarkan masyarakat dari praktek-praktek ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kapitalisme dan liberalisme sehingga melahirkan kekuatan ekonomi yang kuat dan mandiri.

(d) Bidang Sosial Budaya. Kemampuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar tetap menjunjung tinggi nitai-nilai budaya bangsa tanpa terpengaruh oleh budaya asing dalam kehidupan masyarakat sehingga tetap terpeliharanya kerukunan hidup berbangsa dan bernegara di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(e) Bidang Pertahanan. Kemampuan menumbuhkan kesadaran, kesediaan dan kesiapan masyarakat untuk secara mandiri mau menangkal ancaman yang timbul diwilayah masing-masing, baik yang bersumber dari dalam maupun dari luar negeri sehingga dapat menjamin tetap tegaknya kewibawaan pemerintah daerah serta tetap lancarnya roda pemerintahan.

c) Metode Komunikasi Sosial. Tujuan dari komunikasi sosial adalah untuk memelihara dan meningkatkan serta mengeratkan hubungan dengan seluruh komponen bangsa sehingga akan terwujud saling pengertian dan kebersamaan yang mendalam yang memungkinkan timbulnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pertahanan darat negara. Komunikasi sosial dilakukan dalam upaya merebut hati dan pikiran rakyat serta mendapatkan dukungan rakyat terhadap program pembinaan yang dilakukan oleh aparat teritorial. Metoda yang dinilai efektif untuk melakukan komunikasi sosial antara lain :

(1) *Anjangsana*. Anjangsana dilakukan untuk dapat berkomunikasi secara langsung dalam upaya menjalin silaturahmi dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda maupun aparat terkait sehingga tercipta ikatan kekeluargaan yang kuat demi terwujudnya rasa kebersamaan didalam meniti kehidupan berbangsa dan bernegara.

(2) *Komunikasi langsung*. Melaksanakan komunikasi langsung dengan cara tatap muka secara periodik dengan seluruh elemen masyarakat dan aparat terkait guna dapat mencari solusi terbaik dalam mengatasi setiap permasalahan yang terjadi di wilayah.

(3) *Komunikasi tidak langsung*. Melaksanakan komunikasi tidak langsung dengan cara menyelenggarakan kegiatan hiburan masyarakat sehingga pada saat tersebut terlebih dahulu Dandim/ Tokoh masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya demi tujuan yang di harapkan.

d. **Penerapan di lapangan.** Para aparat teritorial di dalam melaksanakan tugas dilapangan harus dapat dan mampu mengaplikasikan semua pengetahuan yang di peroleh dan menerapkannya di lapangan sehingga tujuan dan sasaran yang ingin di capai dapat terwujud dan senantiasa bekerja sama dengan semua elemen masyarakat dan memegang teguh disiplin sebagai landasan dalam berpijak, bertindak dan mengambil suatu keputusan. Tanpa hal tersebut, mustahil apa yang di cita-citakan dapat terwujud sesuai yang di rencanakan. Oleh karena itu sebelum melaksanakan tugas aparat teritorial harus trampil dan konsisten terhadap tugas dan tanggung jawabnya.

e. **Komunikasi Massa.**

1) Dalam konteks menghadapi perkembangan situasi saat ini pembentukan opini publik merupakan faktor yang sangat dominan untuk dapat menguasai hati dan pikiran rakyat, mengingat vitalnya aspek tersebut maka penerapan komunikasi massa harus mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat, oleh karena itulah dalam upaya mengoptimalkan hasil pembinaan teritorial maka kemampuan komunikasi massa ini perlu dibekalkan kepada aparat teritorial yang bertugas di lapangan agar dapat dengan segera berkomunikasi secara efektif dan berdaya guna dengan segenap elemen masyarakat sehingga tercipta daya tangkal terhadap opini yang berkembang yang belum di yakini kebenarannya.

2) Sasaran pembinaan kemampuan komunikasi massa terhadap aparat teritorial adalah :

a) *Komunikasi dengan personel media massa.* Media massa dijadikan sebagai ujung tombak untuk membentuk opini publik dalam upaya untuk mempengaruhi dan merubah cara serta pola berfikir masyarakat kearah yang di kehendaki, oleh karena itu maka hubungan baik melalui komunikasi dengan tokoh/personel media massa harus mampu ditempuh dan diwujudkan dalam proses pelaksanaan pembinaan teritorial oleh aparat teritorial (Kodim).

b) *Komunikasi dengan LSM.* Dalam wacana peran LSM pada era globalisasi adalah merupakan mitra dan sekaligus kepanjangan tangan dan aktor state yang memiliki kepentingan tertentu, oleh karena itu aparat teritorial harus mampu menjalin komunikasi dengan

unsur LSM yang berada di wilayahnya agar mampu mendukung pelaksanaan pembinaan teritorial yang dilakukan, namun hal ini harus dilakukan secara selektif.

c) *Komunikasi dengan Tokoh masyarakat.* Dalam struktur budaya bangsa Indonesia, tokoh masyarakat formal maupun non formal, memiliki peran sangat penting sebagai kunci kendali massa, maka sangat mungkin bila tokoh masyarakat dijadikan sasaran pembinaan oleh aktor state maupun aktor non state dalam situasi seperti saat ini, oleh karena itu kemampuan komunikasi massa terhadap tokoh masyarakat mutlak harus dimiliki oleh setiap aparat teritorial Kodim dalam rangka pengendalian massa dan pelaksanaan tugas di lapangan.

**BAB - VII**  
**P E N U T U P****29. Kesimpulan.**

a. Menghadapi tantangan dan dampak negatif dari perkembangan era globalisasi yang dikhawatirkan akan semakin memperburuk stabilitas keamanan nasional serta terjadinya disintegrasi bangsa, perlu ditempuh suatu langkah yang bersifat strategis dan antisipatif terhadap aparat teritorial sebagai ujung tombak pembina keamanan di wilayah, guna merealisasikan langkah tersebut, upaya yang ditempuh adalah melakukan optimalisasi terhadap kemampuan apter di bidang *lima Kemampuan Teritorial, Penerapan Metoda Binter* secara tepat dan terarah yang mengacu pada prediksi ancaman yang akan timbul.

b. Agar optimalisasi pembinaan teritorial mencapai sasaran yang diharapkan, maka upaya yang ditempuh adalah mengoptimalkan Profesionalitas Aparat Teritorial dan Penerapan Manajemen Teritorial secara tepat serta terarah dengan menggunakan metoda Pendidikan dan latihan, Penataran, Aplikasi Study Kasus, Aplikasi Lapangan dan Komunikasi Massa.

c. Sasaran optimalisasi pembinaan teritorial diprioritaskan kepada upaya terwujudnya kondisi antara lain teratasinya konflik-konflik komunal dan konflik sosial yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga terwujudnya stabilitas keamanan wilayah yang mantap dan kondusif, serta terwujudnya daya tangkal masyarakat dalam menghadapi ancaman yang timbul sebagai dampak perkembangan era globalisasi dan terciptanya kondisi sosial masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi Pancasila.

**30. Saran.** Dari kondisi dan permasalahan yang telah dibahas diatas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

a. Perlu di upayakan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat meningkatkan kinerja aparat teritorial dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

b. Perlu diupayakan peningkatan sumber daya manusia personel aparat teritorial melalui pendidikan yang bertingkat dan berlanjut sesuai strata pangkat dan jabatannya.

31. **Wusana Kata.** Demikian Tulisan tentang Optimalisasi Pembinaan Teritorial guna mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh dalam rangka Pertahanan Negara ini dibuat, semoga dapat bermanfaat bagi Komando Atas dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Bandung, November 2009  
Penulis,